



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 31 Maret 2019/Periodik - 2018)

BIDANG : YUDIKATIF
LEMBAGA : MAHKAMAH KONSTITUSI
UNIT KERJA : SEKRETARIAT JENDERAL
SUB UNIT KERJA : BIRO HUBUNGAN MASYARAKAT DAN PROTOKOL

I. DATA PRIBADI

1. Nama : KURNIASIH PANTI RAHAYU
2. Jabatan : KEPALA BAGIAN TATA USAHA KEPANITERAAN DAN RISALAH
3. NHK : 64783

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN **Rp. 3.936.368.000**

1. Tanah dan Bangunan Seluas 110 m2/85 m2 di KOTA JAKARTA BARAT , HASIL SENDIRI Rp. 1.200.000.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 165 m2/48 m2 di TANGERANG, HASIL SENDIRI Rp. 625.000.000
3. Tanah dan Bangunan Seluas 62 m2/76 m2 di KOTA JAKARTA BARAT , HASIL SENDIRI Rp. 650.000.000
4. Tanah dan Bangunan Seluas 222 m2/73 m2 di BANYUMAS, HASIL SENDIRI Rp. 372.000.000
5. Tanah dan Bangunan Seluas 114 m2/98 m2 di MALANG, HASIL SENDIRI Rp. 590.000.000
6. Tanah dan Bangunan Seluas 434 m2/120 m2 di BANYUMAS, HASIL SENDIRI Rp. 499.368.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN **Rp. 496.500.000**

1. MOTOR, HONDA CMX500AH Tahun 2017, HASIL SENDIRI Rp. 135.000.000
2. MOBIL, HONDA BR-V Tahun 2016, HASIL SENDIRI Rp. 195.000.000
3. MOBIL, HONDA BRIO Tahun 2015, HASIL SENDIRI Rp. 115.000.000
4. MOTOR, KAWASAKI BJ250L Tahun 2016, HASIL SENDIRI Rp. 49.500.000
5. MOTOR, HONDA ASTREA SEPEDA MOTOR Tahun 1983,



WARISAN Rp. 2.000.000		
C. HARTA BERGERAK LAINNYA	Rp.	427.000.000
D. SURAT BERTHARGA	Rp.	----
E. KAS DAN SETARA KAS	Rp.	814.489.922
F. HARTA LAINNYA	Rp.	----
Sub Total	Rp.	5.674.357.922
III. HUTANG	Rp.	150.000.000
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)	Rp.	5.524.357.922

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini diumumkan dengan catatan **LENGKAP** berdasarkan hasil verifikasi tanggal **19 Juli 2019**.
4. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.